

Korelasivitas Indeks Desa Membangun Dimensi Ketahanan Lingkungan pada Kawasan Kumuh di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah

Correlation between the Village Development Index and the Environmental Resilience Dimension of Slum Areas in Priority Villages for Extreme Poverty Reduction in Central Java Province

Priandaru Kurnia¹, Sigit Pandu Basuki²

**Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi,
Universitas Diponegoro¹**
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Tengah²**

Info Artikel

Diterima : 2 Juli 2024
Direvisi : 11 Februari 2025
Disetujui : 29 September 2025

Kata kunci:

Kawasan Kumuh
Penanganan Kemiskinan
Ekstrem
Indeks Ketahanan Lingkungan

Keywords:

Slum Area
Extreme Poverty Management
Environmental Resilience Index

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara luas kawasan kumuh dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) pada desa-desa yang menjadi fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Provinsi Jawa Tengah, dengan menerapkan analisis regresi linear. Temuan menunjukkan bahwa variabel luas kawasan kumuh secara statistik signifikan menjelaskan sekitar 53,2% variabilitas IKL, yang mengindikasikan hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini juga mengusulkan sistem prioritas dalam penanganan masalah kumuh, di mana Desa Karangdempel di Kabupaten Brebes diidentifikasi sebagai lokasi dengan kebutuhan intervensi paling mendesak. Selain itu, hasil analisis menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur dan peningkatan akses terhadap layanan dasar sebagai langkah penting dalam mengatasi masalah lingkungan dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Rekomendasi yang diajukan bertujuan untuk membantu pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang dan mengimplementasikan strategi intervensi yang lebih efektif, yang tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga pada pemulihan dan penguatan ketahanan lingkungan desa.

Abstract

This research aims to understand the relationship between the extent of slum areas and the Environmental Resilience Index (IKL) in villages targeted by the Extreme Poverty Management (PKE) program in Central Java, employing linear regression analysis. Findings reveal that the slum area size significantly explains about 53.2% of the variability in IKL, indicating a strong correlation between the two variables. The study also proposes a priority system for addressing slum issues, identifying Karangdempel Village in Brebes District as the most urgently needing intervention location. Furthermore, the analysis underscores the importance of infrastructure development and enhanced access to basic services as crucial steps in addressing environmental issues

Corresponding Author :
Priandaru Kurnia
Priandaru10@gmail.com
081315701458

and supporting extreme poverty alleviation efforts. The recommendations aim to assist policymakers and practitioners in designing and implementing more effective intervention strategies, focusing not only on improving the quality of life but also on restoring and strengthening the environmental resilience of villages.

PENDAHULUAN

Kemiskinan berkorelasi dengan kekumuhan sehingga permukiman kumuh pada umumnya berada di masyarakat yang berpenghasilan rendah (Andriana & Manaf, 2017). Fasilitas umum yang tidak memadai, bangunan rumah yang padat, dan tidak layak huni adalah ciri dari permukiman kumuh (Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016).

Isu ini sangat relevan, mengingat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Tengah 2024-2026, menyoroti kemiskinan sebagai salah satu tantangan utama. Provinsi ini memiliki angka kemiskinan yang tinggi dan pendapatan per kapita yang rendah dibandingkan provinsi lain di Jawa dan Bali.

Kemiskinan adalah suatu situasi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Adawiyah, 2020). Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Indonesia menggunakan definisi kemiskinan ekstrem

menurut *World Bank*, yaitu mereka yang hidup dengan pendapatan di bawah US\$ 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari. Untuk tahun 2024, angka ini setara dengan Rp 11.924,13 per hari atau Rp 362.692,14 per kapita per bulan.(Andriana & Manaf, 2017)

Untuk menangani kemiskinan ekstrem, pada (Inpres No 4 Tahun 2022) menugaskan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan penduduk miskin ekstrem dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai data dasar. BPS juga ditugaskan untuk menyelenggarakan survei sebagai sarana evaluasi perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang merupakan bagian dari survei sosial dan ekonomi nasional.

Di Jawa Tengah, kemiskinan ekstrem mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi yang layak, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan akses informasi. Kondisi ini membuat banyak individu dan keluarga terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa adanya akses untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, sehingga diperlukan upaya kolaboratif dan strategis untuk mengatasinya.

Arahan Presiden terkait strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem meliputi

tiga strategi utama, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan fokus pada pengurangan kemiskinan di daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan.

Fokus pada desa-desa yang mengalami kondisi kumuh dalam konteks desa PKE tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga untuk mempromosikan lingkungan yang sehat dan kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Menurut Kementerian (Pekerjaan Umum, 2016), kawasan kumuh (*slum area*) adalah kawasan yang secara fisik, ekonomi, sosial, budaya dan sosial politik mengalami degradasi dan melekat beberapa masalah sehingga daya dukung lahan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Terdapat kaitan antara kondisi ekonomi seseorang dengan skala prioritas kebutuhan hidup dan kebutuhan perumahan. Dengan demikian, terdapat “Rencana Program Prioritas Perangkat Daerah”, pada bagian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang mencakup penanganan kawasan permukiman kumuh, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh (RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026).

Oleh karena itu, perlu dilakukan uji korelasi antara klasifikasi Indeks Desa Membangun dengan luasan kumuh desa PKE.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara klasifikasi Indeks Ketahanan Lingkungan, dengan desa PKE yang memiliki kawasan kumuh. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi penanganan sebaran desa prioritas guna menciptakan lingkungan yang lebih baik, sekaligus memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis spasial menggunakan *software ArcGIS*. ArcGIS adalah perangkat yang sangat populer dan andal dalam melakukan tugas-tugas Sistem Informasi Geografis (GIS), tidak hanya untuk membuat peta tetapi juga membantu praktisi melakukan analisis pemodelan dan pengelolaan data spasial secara efektif dan efisien. (Ii & Pustaka, 2020).

Metode deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang suatu keadaan dengan menggunakan angka dalam pengumpulan, penafsiran, dan penyajian data. (Arikunto, 2020). Sebagai contoh, penelitian oleh (Lestari et al., 2024) menggunakan metode ini untuk menganalisis potensi wilayah berdasarkan data spasial, mengidentifikasi daerah yang memerlukan

intervensi lebih lanjut dalam pengelolaan lingkungan.

Penelitian ini juga menggunakan metode matriks untuk menentukan prioritas penanganan kawasan kumuh di desa-desa yang menjadi fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Metode matriks adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan objek penelitian berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Setiap kriteria diberikan bobot tertentu sesuai dengan tingkat kepentingannya, dan objek penelitian diberi skor berdasarkan kriteria tersebut. Contoh penggunaan metode matriks dapat dilihat dalam penelitian oleh Bappenas pada tahun 2021, yang menggunakan matriks untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal. Metode ini membantu peneliti dan membuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih objektif dan berbasis data (BAPPENAS, 2021).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode matriks untuk menentukan prioritas penanganan kawasan kumuh di desa-desa yang menjadi fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE). Metode matriks adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan objek penelitian berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Setiap kriteria diberikan bobot

tertentu sesuai dengan tingkat kepentingannya, dan objek penelitian diberi skor berdasarkan kriteria tersebut. Contoh penggunaan metode matriks dapat dilihat dalam penelitian oleh Bappenas pada tahun 2021, yang menggunakan matriks untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal. Metode ini membantu peneliti dan membuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih objektif dan berbasis data.

Menurut Mahendrasari dan Permata (2016), analisis spasial merupakan kemampuan umum untuk menyusun atau mengolah data spasial ke dalam berbagai bentuk yang berbeda sedemikian rupa, sehingga mampu menambah atau memberikan arti baru atau arti tambahan (Serliyanti, 2016).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem yang berjumlah sebanyak 126 desa dengan batasan desa yang mempunyai luasan kawasan kumuh di Provinsi Jawa Tengah, sehingga data yang dapat digunakan hanya berjumlah 11 desa.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data Persebaran Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Dana Desa (Kemenkeu, 2015), Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)

bagian Indeks Ketahanan Lingkungan yang bersumber dari Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Jenderal et al., 2021), dan titik desa yang mempunyai data luasan kumuh di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

398.4.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa (Jenderal et al., 2021), dan titik desa yang mempunyai data luasan kumuh di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan keterkaitan antara Desa Prioritas PKE yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dengan Indeks Desa Membangun Dimensi Kualitas Lingkungan terhadap ada atau tidaknya pencemaran air, tanah dan udara (kawasan kumuh). Berikut merupakan bagan penelitian untuk mencari korelativitas.



Gambar 1 Bagan Analisis

Sumber: Analisis Mandiri, 2024

Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Provinsi Jawa Tengah

Priandaru Kusuma dan Sigit Pandu Basuki
Korelasivitas Indeks Desa Membangun Dimensi Ketahanan Lingkungan pada Kawasan Kumuh di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah

Berikut merupakan tabel persebaran Desa PKE di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021.

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antar negara dan antar waktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*) di bawah US\$1,9 per hari. (TNP2K, 2022)

Tabel 1 Persebaran Desa Prioritas

Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun

2021

No	Kabupaten	Jumlah Desa
1	Banjarnegara	25
2	Banyumas	24
3	Brebes	26
4	Kebumen	25
5	Pemalang	26
JUMLAH		126

Sumber: Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dari kelima kabupaten yang tercakup dalam penyebaran tersebut, dua di antaranya, yakni Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang, menetapkan 26 desa sebagai Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem dari wilayah kabupaten tersebut. Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen menyusul dengan menetapkan 25 desa

sebagai Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Sementara itu, pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.

Kabupaten Banyumas menetapkan 24 desa sebagai Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem.

Nilai IDM yang lebih tinggi mencerminkan perkembangan desa yang lebih baik. Klasifikasi Status IDM adalah sebagai berikut (Permendes No 2 Tahun, 2016):

Indeks Desa Membangun (IDM) pada Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Provinsi Jawa Tengah

Salah satu pendekatan efektif dalam mengatasi penurunan area kantong kemiskinan adalah melalui penyediaan layanan dasar di desa-desa yang mengalami kemiskinan ekstrem. Keberhasilan dalam penyediaan layanan dasar ini dapat diukur melalui status desa yang ditentukan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Pada (Permendes No 2 Tahun, 2016) Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani

1. Desa Sangat Tertinggal: $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal: $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju: $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri: $IDM > 0,8155$

Berikut merupakan tabel persebaran pengklasifikasian Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2 Status Indeks Desa Membangun (IDM) dengan Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Klasifikasi IDM		
			Tertinggal	Berkembang	Maju
1	Banjarnegara	25		21	4
2	Banyumas	24		15	9
3	Brebes	26	2	22	2
4	Kebumen	25	2	19	4
5	Pemalang	26		17	9
TOTAL		126	4	94	28
		100%	3%	75%	22%

Sumber: Analisis Mandiri, 2024

Desa dengan status 'Maju' sejumlah 22% yang tercatat memiliki kemiskinan ekstrem menunjukkan adanya anomali dalam data atau indikasi bahwa walaupun secara umum desa tersebut telah mencapai tingkat pembangunan yang tinggi, masih terdapat kelompok-kelompok yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya yang mungkin tidak merata di dalam desa tersebut.

Di sisi lain, keberadaan desa 'Tertinggal' sejumlah 3% yang minim atau tidak memiliki kasus kemiskinan ekstrem mungkin menandakan bahwa, meskipun infrastruktur dan layanan publik belum berkembang, komunitas di desa-desa tersebut mampu

memenuhi kebutuhan dasar mereka atau telah menerima bantuan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

Desa 'Berkembang' dengan jumlah 75% berada di posisi tengah, yang secara teoritis merupakan kategori yang paling sesuai untuk menunjukkan perjuangan melawan kemiskinan ekstrem. Desa-desa ini, yang merupakan mayoritas dalam data, menunjukkan bahwa ada upaya dan potensi yang signifikan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup, namun masih dalam proses mengatasi tantangan-tantangan struktural dan ekonomi.

Indeks Ketahanan Lingkungan pada Indeks Desa Membangun di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah

Menurut (Permendes No 2 Tahun, 2016), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan gabungan dari 2 (dua) indikator kunci, yakni indikator kualitas lingkungan dan indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Masing-masing indikator memiliki 2 (dua) variabel, yakni indikator kualitas lingkungan: (i) ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah, dan udara, dan (ii) terdapat sungai yang terkena limbah. Sedangkan untuk indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana: (i) kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan), dan (ii) upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana) (Okto Ariyanto, 2022).

Berikut merupakan klasifikasi IKL menurut (Permendes No 2 Tahun, 2016), ditetapkan rentang sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: $IKL \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal: $0,4907 < IKL \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang: $0,5989 < IKL \leq 0,7072$
4. Desa Maju: $0,7072 < IKL \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri: $IKL > 0,815$

Tabel 3 Status Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) pada Indeks Desa Membangun (IDM) di Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Klasifikasi				
			Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Banjarnegara	25	-	-	18	6	1
2	Banyumas	24	-	2	16	1	5
3	Brebes	26	2	5	19	-	-
4	Kebumen	25	2	2	11	6	4
5	Pemalang	26	-	2	15	9	-
TOTAL		126	4	11	79	22	10
		100%	3%	9%	63%	17%	8%

Sumber: Analisis Mandiri, 2024

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa desa-desa dalam kategori 'Maju' dan 'Mandiri' tercatat dalam data desa prioritas penanganan kemiskinan ekstrem menimbulkan pertanyaan signifikan. Ini mengindikasikan adanya anomali atau ketidaksesuaian data, karena secara teori, desa-desa dengan status 'Maju' atau 'Mandiri' seharusnya memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sekaligus mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan.

Analisis menunjukkan bahwa 63% desa yang ditinjau berada dalam kategori 'Berkembang', menandakan mayoritas desa di Jawa Tengah berada pada tahap pembangunan positif dengan kemampuan mengelola dan mempertahankan ketahanan lingkungan. Sebanyak 17% desa mencapai kategori 'Maju' dan 8% berhasil mencapai status 'Mandiri', menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek pembangunan dan ketahanan lingkungan.

Namun, desa dalam kategori 'Maju' dan 'Mandiri' yang masih memerlukan penanganan kemiskinan ekstrem membutuhkan analisis lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur fisik dan ketahanan lingkungan telah dikembangkan, aspek sosial-ekonomi tertentu belum sepenuhnya.

Indeks Ketahanan Lingkungan pada Indeks Desa Membangun dengan Kawasan Kumuh di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah

Menurut *CSU's Urban Studies Department*, kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, penduduk yang padat serta keterbatasan ruang (untuk ventilasi cahaya, udara, sanitasi, dan lapangan terbuka) (Pide & Makassar, 2023)

Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Perwal Pekalongan No. 50 Tahun, 2022)

Permukiman kumuh dapat timbul karena beberapa hal, seperti kondisi bangunan yang tidak layak huni akibat kondisi ekonomi masyarakat yang kurang memadai, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu memiliki bangunan rumah yang layak. Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi pada kawasan permukiman kumuh

mengindikasikan bahwa masyarakat tidak mampu untuk ‘membeli’ lahan yang lebih memadai untuk membangun hunian. Salah satu dampak dari tingkat kepadatan bangunan yang tinggi ialah sarana dan prasarana dasar permukiman yang ada tidak mampu menjangkau seluruh kawasan permukiman (Andriana & Manaf, 2017).

Kawasan kumuh menjadi salah satu indikator penting sebagai penyusun dari Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Berikut merupakan klasifikasi Indeks Ketahanan Lingkungan dengan desa yang teridentifikasi mempunyai luas kumuh yang terdapat di Desa Prioritas PKE Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4 Klasifikasi IKL dengan Desa yang Teridentifikasi memiliki Kawasan Kumuh

Klasifikasi	Terdapat Kawasan Kumuh	Tidak Terdapat Kawasan Kumuh
Sangat Tertinggal	2	2
Tertinggal	2	9
Berkembang	7	72
Maju		22
Mandiri		10
Total	11	115
Persentase	9%	91%

Sumber: Analisis Mandiri, 2024

Keberadaan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) di desa 'Maju' yang menunjukkan adanya kawasan kumuh merupakan anomali data mengingat desa 'Maju' seharusnya tidak memiliki indikasi kemiskinan ekstrem yang ada di Desa Prioritas PKE di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Ke sebelas desa yang teridentifikasi memiliki kawasan kumuh, yang mewakili 9% dari total desa yang ditinjau, mayoritas berada pada kategori 'Berkembang', menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya peningkatan, masih terdapat tantangan signifikan dalam

mencapai ketahanan lingkungan dan mengatasi kondisi kumuh.

Strategi pencegahan bertujuan mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Strategi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang semula merupakan permukiman kumuh supaya menjadi kawasan yang lebih baik (Resa et al., 2017). Fakta ini menunjukkan pentingnya integrasi strategi pembangunan yang tidak hanya menargetkan peningkatan ekonomi dan infrastruktur tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan

mengatasi masalah kemiskinan ekstrem melalui peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.

Tabel 5 Lokasi Desa Prioritas Penanganan PKE yang teridentifikasi Luas Kumuh beserta dengan Luas dan Nilai IKL

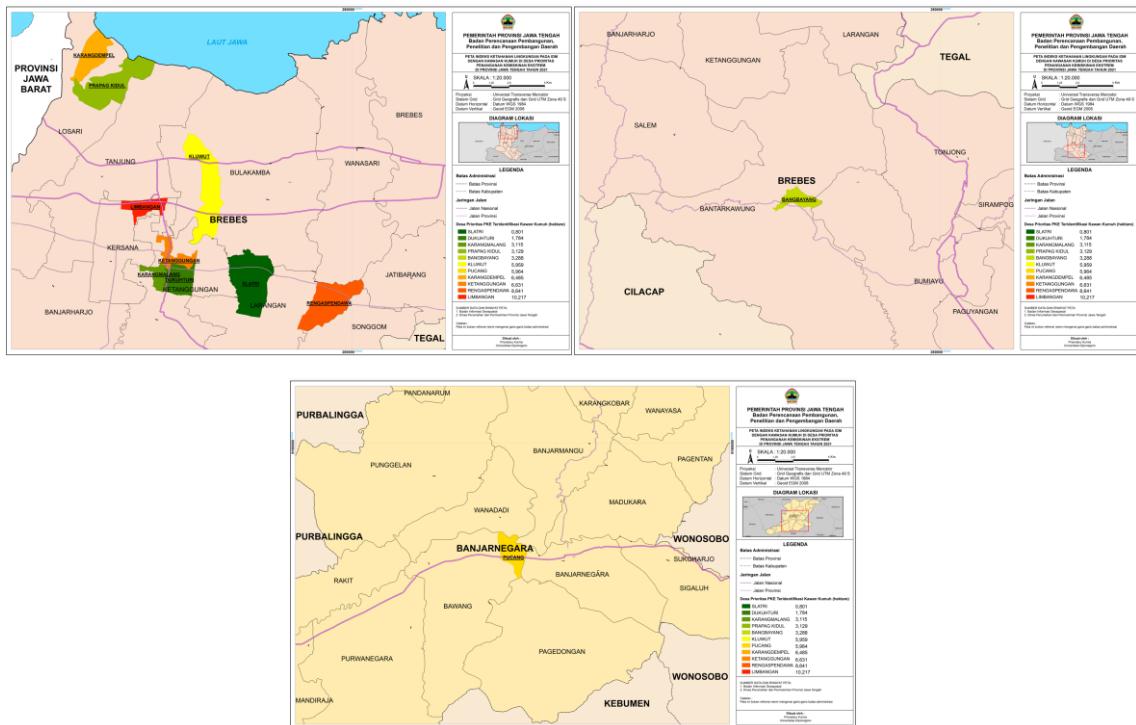
No	Kabupaten	Kecamatan	Desa Prioritas PKE	Luas	
				Kumuh (ha)	Klasifikasi IKL
1	BANJARNEGARA	BAWANG	PUCANG	5,964	Desa Berkembang
2	BREBES	LARANGAN	SLATRI	0,801	Desa Berkembang
3	BREBES	KETANGGUNGAN	DUKUHTURI	1,784	Desa Berkembang
4	BREBES	KETANGGUNGAN	KARANGMALANG	3,115	Desa Berkembang
5	BREBES	LOSARI	PRAPAG KIDUL	3,129	Desa Berkembang
6	BREBES	BANTARKAWUNG	BANGBAYANG	3,288	Desa Berkembang
7	BREBES	BULAKAMBA	KLUWUT	5,959	Desa Tertinggal
8	BREBES	LOSARI	KARANGDEMPEL	6,485	Desa Sangat Tertinggal
9	BREBES	KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN	6,631	Desa Berkembang
10	BREBES	LARANGAN	RENGASPENDAWA	8,641	Desa Tertinggal
11	BREBES	LOSARI	LIMBANGAN	10,217	Desa Sangat Tertinggal

Sumber: Analisis Mandiri, 2024

Dalam analisis data terkait Desa Prioritas Penanganan PKE yang meliputi luas kumuh dan klasifikasi Indeks Kemandirian Lokal (IKL) di Kabupaten Banjarnegara dan Brebes, terdapat temuan menarik serta potensi anomali yang memerlukan perhatian khusus. Data menunjukkan bahwa desa dengan klasifikasi "Sangat Tertinggal" dan "Tertinggal" cenderung memiliki luas area kumuh yang lebih besar, sesuai dengan harapan bahwa infrastruktur dan penanganan kumuh di desa-desa tersebut belum berkembang secara optimal.

Namun, anomali muncul ketika desa yang diklasifikasikan sebagai "Berkembang" tercatat memiliki luas kumuh yang signifikan, seperti terlihat pada Desa Ketanggungan yang memiliki luas kumuh mencapai 6,631 hektar, salah satu yang tertinggi di antara desa yang terdata. Anomali ini menunjukkan adanya potensi kesalahan, klasifikasi desa, atau adanya tantangan tersendiri yang dihadapi desa tersebut dalam penanganan area kumuh. Faktor-faktor ini mungkin termasuk lokasi geografis yang sulit atau adanya proyek pembangunan baru yang belum sepenuhnya menyelesaikan masalah kumuh. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya

investigasi lebih lanjut untuk memahami penyebab anomali dan memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa diarahkan secara efektif dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.



Gambar 2 Peta IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan) pada IDM dengan Kawasan Kumuh di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Sumber: Analisis Mandiri, 2024

Berdasarkan peta di atas dapat diketahui sebaran luas area kumuh di berbagai Desa Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banjarnegara. Desa Slatri di Kabupaten Brebes, dengan luas kumuh hanya 0,801 hektar, tampak sebagai area dengan tantangan kumuh paling minimal di antara desa-desa yang tercatat. Di sisi lain, Desa Limbangan juga di Kabupaten Brebes, memiliki luas

kumuh yang mencapai 10,217 hektar, menjadi desa dengan permasalahan kumuh terluas yang tergambar dalam peta.

Transisi luas kumuh antar desa beragam, mulai dari Desa Dukuh Turi dengan 1,784 hektar, meningkat secara signifikan hingga mencapai Desa Ketanggungan yang memiliki luas kumuh 6,631 hektar. Menariknya, meskipun sebagian besar desa dalam peta ini berada di Kabupaten Brebes, Desa Pucang, yang terletak di Kabupaten Banjarnegara, menunjukkan kondisi kumuh

yang cukup serius dengan luas 5,964 hektar, hampir sebanding dengan desa-desa besar lainnya di Kabupaten Brebes.

Keterkaitan geografis antara desa-desa ini mungkin memberikan wawasan penting mengenai pola-pola perkembangan atau penyebaran area kumuh dalam skala regional. Dengan mengamati peta, *stakeholder* dan pembuat kebijakan bisa menilai dimana sumber daya dan intervensi perlu difokuskan untuk mengatasi masalah kumuh, serta memetakan dinamika perkembangan

perubahan satu variabel cenderung berhubungan proporsional dengan perubahan variabel lain.

Kedua, regresi linear menyediakan alat analisis yang jelas dan mudah diinterpretasikan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan, memungkinkan peneliti mengidentifikasi dan mengkuantifikasi pengaruh luas kumuh terhadap perkembangan desa secara statistik.

Ketiga, regresi linear memungkinkan pemodelan hubungan variabel dengan cara

Variable Entered

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LuasKumuh ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: KlasifikasiKL

b. All requested variables entered.

Analisis regresi linear menunjukkan bahwa variabel Luas Kumuh dimasukkan ke dalam model sebagai variabel independen dengan metode "Enter". Analisis ini bertujuan menguji pengaruh langsung Luas Kumuh terhadap Klasifikasi IKL sebagai variabel

dependen. Tidak ada variabel yang dikeluarkan, menegaskan bahwa fokus utama penelitian adalah memahami kontribusi luas kumuh terhadap tingkat perkembangan desa yang diukur melalui Klasifikasi IKL.

Model Summary

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.730 ^a	.532	.480	.59131

a. *Predictors: (Constant), LuasKumuh*

Koefisien korelasi (R) sebesar 0.730 menunjukkan hubungan yang kuat antara Luas Kumuh dan Klasifikasi IKL, di mana peningkatan luas kumuh cenderung diikuti oleh peningkatan Klasifikasi IKL. Nilai *R Square* (0.532) menunjukkan bahwa sekitar 53,2% variasi dalam Klasifikasi IKL dapat dijelaskan oleh variabel Luas Kumuh. *Adjusted R Square* (0.480) memberikan estimasi yang lebih akurat tentang varians yang dijelaskan oleh model dalam populasi, menyesuaikan berdasarkan jumlah sampel dan variabel.

Analisis Anova

ANOVA^a

Model	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	3.580	1	3.580	10.240
	<i>Residual</i>	3.147	9	.350	
	Total	6.727	10		

a. *Dependent Variable:* KlasifikasiKLb. *Predictors:* (Constant), LuasKumuh

Model regresi memiliki signifikansi statistik dengan nilai F sebesar 10,240 dan nilai p (*Sig.*) sebesar 0,011. Ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan variabilitas Klasifikasi IKL berdasarkan Luas Kumuh. *Sum of Squares* untuk regresi sebesar 3,580, menunjukkan total variasi yang dijelaskan oleh model, sementara *Residual Sum of Squares* sebesar 3,147, merefleksikan total variasi yang tidak dijelaskan oleh model.

Uji t (Uji Koefisien Regresi)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		<i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>			
1	(Constant)	.501	.372	1.346	.211
	LuasKumuh	.205	.064	.730	3.200

a. *Dependent Variable:* KlasifikasiKL

Menurut (Ghozali, 2012), uji statistik t adalah suatu uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Koefisien untuk Luas Kumuh adalah 0,205 dengan nilai p (*Sig.*) sebesar 0,011, menegaskan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara Luas Kumuh dan Klasifikasi IKL. Dengan kata lain, untuk setiap penambahan satu unit luas kumuh, terdapat peningkatan sebesar 0,205 pada skala Klasifikasi IKL. Intersep model sebesar 0,501, yang mengindikasikan nilai dasar Klasifikasi IKL ketika Luas Kumuh adalah nol, namun nilai p untuk intersep menunjukkan bahwa ini tidak secara statistik signifikan, yang berarti tidak cukup bukti untuk menunjukkan nilai dasar Klasifikasi IKL yang spesifik ketika tidak ada luas kumuh.

Penentuan Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah

Pendekatan matriks dalam menentukan prioritas penanganan desa

merupakan metode yang sistematis dan objektif untuk mengevaluasi dan mengklasifikasikan desa berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Metode ini memungkinkan peneliti dan pembuat kebijakan untuk secara kuantitatif mengukur dan membandingkan kebutuhan antar desa, sehingga memastikan alokasi sumber daya dan upaya yang paling efektif.

Luas area yang kumuh dapat menandakan tingkat urgensi intervensi yang diperlukan, sedangkan status perkembangan desa mengindikasikan tingkat dukungan dan sumber daya yang sudah ada serta yang masih diperlukan untuk pembangunan desa. Dengan memberikan bobot kepada setiap kriteria 0,7 untuk luas area dan 0,3 untuk status perkembangan peneliti membuat sistem skor yang mencerminkan pentingnya masing-masing aspek ini terhadap penentuan prioritas.

Semakin baik nilai yang dimiliki dari 2 pertimbangan tersebut, maka akan semakin berpotensi untuk menjadi prioritas. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan prioritas penanganan Kawasan Kumuh di desa prioritas PKE Provinsi Jawa Tengah.

Tabel Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh di Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	Luas (hektar)	Desa PKE	Prioritas Penanganan
BREBES	LOSARI	KARANGDEMPEL	6,486	Desa Tertinggal	1
BREBES	LARANGAN	SLATRI	0,802	Desa Berkembang	2
BREBES	KETANGGUNGAN	DUKUHTURI	1,785	Desa Berkembang	2
BREBES	KETANGGUNGAN	KARANGMALANG	3,116	Desa Berkembang	2
BREBES	LOSARI	PRAPAG KIDUL	3,130	Desa Berkembang	2
BREBES	BANTARKAWUNG	BANGBAYANG	3,288	Desa Berkembang	2
BREBES	BULAKAMBA	KLUWUT	5,960	Desa Berkembang	2
BREBES	LARANGAN	RENGASPENDAWA	8,642	Desa Berkembang	2
BREBES	LOSARI	LIMBANGAN	10,217	Desa Berkembang	2
BANJARNEGARA	BAWANG	PUCANG	5,964	Desa Maju	3
BREBES	KETANGGUNGAN	KETANGGUNGAN	6,631	Desa Maju	3

Sumber: Analisis Mandiri, 2024

Dalam tabel alokasi prioritas untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Brebes, Desa Karangdempel menduduki peringkat teratas dengan prioritas 1, menandai kebutuhan mendesak atas intervensi. Dengan luas kumuh yang signifikan sebesar 6.486 hektar dan status sebagai 'Desa Tertinggal', desa ini menjadi fokus utama.

Di sisi lain, sejumlah desa dengan status 'Desa Berkembang' seperti Desa Slatri, Desa Dukuhturi, Desa Karangmalang, dan lainnya, meski luas kawasan kumuhnya lebih kecil, tetap ditetapkan pada prioritas 2. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan masih sangat dibutuhkan untuk mendorong

perkembangan lebih lanjut. Sedangkan di Kabupaten Banjarnegara, Desa Pucang dan di Kabupaten Brebes, Desa Ketanggungan, keduanya dinilai sebagai 'Desa Maju' dengan prioritas 3, menunjukkan bahwa walaupun kemajuan telah dicapai, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek penanganan kumuh yang lebih terbatas.

Prioritas yang diberikan mencerminkan pendekatan strategis dalam alokasi sumber daya dan usaha, dengan memastikan bahwa intervensi diarahkan terlebih dahulu ke daerah yang paling membutuhkan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti 126 desa di Jawa Tengah yang termasuk dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem, di mana 11 di antaranya menghadapi permasalahan kawasan kumuh. Sebagian besar desa, yaitu 75%, diklasifikasikan sebagai 'Berkembang' menurut Indeks Desa Membangun (IDM) dengan faktor Ketahanan Lingkungan sebagai indikator dominan.

Studi ini menggunakan regresi linear untuk memahami dinamika antara luas kumuh dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), menemukan korelasi substansial dengan koefisien 0,730. Artinya, luas kawasan kumuh mempengaruhi sekitar 53,2% variabilitas IKL desa. Kekuatan model ini ditegaskan oleh signifikansi statistik dari uji F. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh adalah kunci untuk memperbaiki lingkungan dan status desa.

Dalam menetapkan prioritas untuk penanganan kawasan kumuh, penelitian ini mengusulkan tiga tingkat prioritas, dengan Prioritas I sebagai yang terpenting. Contohnya, Desa Karangdempel di Kabupaten Brebes, berstatus 'Desa Tertinggal' dan memiliki kawasan kumuh terluas, dianggap memerlukan intervensi segera. Pada IKG faktor Ketahanan Lingkungan sendiri menurut Permendesa No. 2 Tahun 2016 tidak hanya diukur menggunakan kualitas lingkungan, juga terdapat potensi rawan

bencana dan tanggap bencana sebagai variabel pengukur lainnya yang tidak dianalisis pada penelitian ini. Namun, berdasarkan korelasinya didapatkan pengaruh dengan persentase yang cukup besar. Dengan demikian, temuan tersebut memberikan wawasan penting untuk strategi penanganan masalah kemiskinan ekstrem di provinsi Jawa Tengah, dengan menekankan pada perbaikan kawasan kumuh sebagai langkah krusial.

SARAN

Pemerintah Daerah dan Dinas terkait:

1. Menyusun dan mengimplementasikan rencana tindak yang menyeluruh untuk mengatasi kawasan kumuh dengan mengintegrasikan program peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
2. Memperkuat sinergi antar departemen, termasuk lingkungan hidup, perumahan, dan sosial, untuk pendekatan holistik dalam penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh.
3. Meningkatkan akses ke sumber daya bagi desa 'Berkembang' dan 'Tertinggal', dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup ketahanan lingkungan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda):

1. Memasukkan penilaian kondisi infrastruktur dan kawasan kumuh sebagai indikator prioritas dalam alokasi anggaran pembangunan daerah.
 2. Menilai potensi rawan bencana dan kesiapan tanggap bencana sebagai faktor kunci dalam rencana pengembangan desa, khususnya bagi desa dengan risiko tinggi.
- potensi rawan bencana dan kesiapan tanggap bencana yang juga merupakan bagian dari Indeks Ketahanan Lingkungan, agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
2. Melakukan studi untuk memantau perubahan dan perkembangan setelah implementasi program penanganan kawasan kumuh, sehingga dapat dievaluasi efektivitas intervensi.
 3. Mengintegrasikan analisis data kualitatif dari pengalaman penduduk setempat untuk mendapatkan *insight* mendalam tentang kebutuhan spesifik dan tantangan dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Kementerian Desa, PDTT:

1. Mengadakan pelatihan dan *workshop* bagi pemangku kebijakan desa untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan kawasan kumuh dan ketahanan lingkungan.
2. Mendorong pembentukan kerja sama regional antar kabupaten untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang mencakup aspek lingkungan dan infrastruktur.

Penelitian Lanjutan:

1. Memperluas variabel penelitian untuk mencakup faktor-faktor seperti

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan bahwa kebijakan dan inisiatif pemerintah serta penelitian mendatang akan lebih efektif dan terarah dalam menangani isu kemiskinan ekstrem dan kawasan kumuh, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E. (2020). *Kemiskinan_Dan_Penyebabnya.* 1(April), 43–50.
- Andriana, L., & Manaf, A. (2017). Relevansi Aspek Kemiskinan dan Fisik Lingkungan Kumuh Pada Penentuan Lokasi Penerima Program Kotaku (Studi Kasus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Pengembangan Kota*, 5(2), 131. <https://doi.org/10.14710/jpk.5.2.131-139>
- Arikunto. (2020). Metode kuantitatif deskriptif. *Gastronomía ecuatoriana y turismo local.*, 1(69), 5–24. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/B AB III.pdf
- BAPPENAS. (2021). *Bappenas.*
- Ghozali. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20.*
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2020). 16 11 22675 2. 9–21.
- Inpres No 4 Tahun. (2022). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. *Badan Pemeriksaan Keuangan*, 146187, 1–15. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/211477/inpres-no-4-tahun-2022>
- Jenderal, K. D., Desa, P., Perdesaan, D. A. N., Keempat, P., Keputusan, A., Jenderal, D., Dan, P., Masyarakat, P., & Desa, K. (2021). *Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa.*
- Kemenkeu. (2015). *Permenkeu No. 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,*
- Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
- Lestari, A. D. P., Setyaningrum, E. W., & Dewi, A. T. K. (2024). Pemetaan Sebaran Bahan Organik Di Pesisir Kabupaten Banyuwangi. *Barakuda*, 6(1), 52–63.
- Okto Ariyanto. (2022). *Pengaruh APBDes Terhadap Indeks Desa Membangun (Idm) Dan Indeks Ketahanan Lingkungan (Ikl) Di Kabupaten Lampung Selatan. Idm.*
- Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016. (2016). *Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2016.*
- Permendes No 2 Tahun. (2016). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun.*
- Perwal Pekalongan No. 50 Tahun. (2022). *Peraturan Walikota Pekalongan No 50 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.*
- Pide, A., & Makassar, U. M. (2023). *M ARIF ANUGRAH. February.*
- Resa, A. M., Saam, Z., & Tarumun, S. (2017). Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.31258/dli.4.2.p.117-127>
- RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026. (n.d.). *RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.*
- Serliyanti. (2016). *Kajian Spasial Potensi..., Serliyanti, FKIP UMP*, 2022. 6–26.
- TNP2K. (2022). *Penentuan Wilayah Prioritas Kemiskinan Ekstrem 2021-2024.* 1–20.